

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta : UII Press.
- Adrian Sutedi. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Bernhard Limbong. 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- M. Manullang. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Miriam Budiharjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press.

Salim HS. 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta : Sinar Grafika.

Shinta Agustina. 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok : Themis Books.

Sujamto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Yance Arizona. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta : STPN Press.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor : 103.K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana

Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 540/-/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Emas Bumi Persada.

Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 540/15/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Triple Eight Energy.

C. Media dan Website

Harian Padang Ekspres, *Pengawasan Lemah, Kerusakan Lingkungan Menjadi-jadi*, 24 November 2015, hlm. 1.

Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan. http://rc.bappenas.go.id/files/3113/4986/1939/6mengatasi-tumpang-tindih-antara-lahan-pertambangan-dan-kehutanan_20081123185136_1261_5.pdf. Diakses tanggal 25 Oktober 2015, Pukul 23.18 WIB.

<http://www.solselkab.go.id/post/read/88/pertambangan-investor.html>. Diakses tanggal 25 Oktober 2015, Pukul 00.04 WIB.

<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-pertambangan/>. Diakses tanggal 27 November 2015, Pukul 02.07 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35730/4/Chapter%20II.pdf>. Diakses tanggal 14 Februari 2016, Pukul 15.37 WIB.

<http://staff.unila.ac.id/budikurniawan/files/2013/12/Desentralisasi-atau-Resentralisasi-Tinjauan-Kritis-UU-23-Tahun-2014.pdf>. Diakses tanggal 22 Maret 2016, Pukul 19.20 WIB.

D. Tesis

Dian Eka Rahayu Sawitri. 2013. *Kebijakan Clean and Clear Dalam Menata Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.